



KEBIJAKAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Mukrim Ainullah¹, Rudi², Alwan Subhan³

Universitas Negeri Alauddin Makassar

Makassar, Indonesia

Email: mukrimainullah@gmail.com

Abstrak Penelitian ini membahas tentang kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pembiayaan pendidikan yang efektif memiliki peran penting dalam menjamin pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai literatur terkait kebijakan pembiayaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang efisien dan adil, serta peningkatan kapasitas pengelola pendidikan, menjadi kunci utama peningkatan mutu pendidikan. Kendala seperti ketimpangan penyaluran dana dan kurangnya kapasitas pengelola perlu diperhatikan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih baik. Kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial dan efisiensi diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermutu.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pengelolaan Dana, Efisiensi

Abstract. This study discusses the policy of education financing management in an effort to improve the quality of education in Indonesia. Effective education financing has an important role in ensuring equal access to education and improving the quality of teaching and learning. This study uses a literature review approach by examining various literature related to education financing policies, education fund management, and their impact on education quality. The results of the study indicate that efficient and fair fund management, as well as increasing the capacity of education managers, are key to improving the quality of education. Obstacles such as inequality in fund distribution and lack of managerial capacity need to be considered in formulating better education financing policies. Policies based on social justice and efficiency are expected to create a broader positive impact in creating a higher quality education system.

Keywords: Education Policy, Education Financing, Education Quality, Fund Management, Efficiency

1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa (Mardonov et al., 2020). Melalui pendidikan, kualitas sumber daya

manusia dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah pembiayaan yang memadai. Namun, di Indonesia, pengelolaan pembiayaan pendidikan

masih menjadi masalah yang kompleks. Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, pengelolaan dana yang efektif dan efisien masih menjadi tantangan besar (Sitorus et al., 2024). Ketidakmerataan distribusi dana pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sejumlah daerah, terutama yang terletak di wilayah terpencil atau kurang berkembang, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas, baik dari segi fasilitas maupun kualitas pengajaran.

Masalah pembiayaan pendidikan ini semakin terasa karena keterbatasan anggaran yang tersedia (Irianto & Lilia, 2024), di samping kebutuhan yang terus berkembang untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang belum optimal sering kali berujung pada pemborosan dana atau penyalahgunaan anggaran, yang justru merugikan kualitas pendidikan itu sendiri (Akbar & Syamsir, 2024). Hal ini memunculkan kebutuhan akan kebijakan manajemen pembiayaan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan pemerataan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Dalam konteks tersebut, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Shava et al., 2023). Pemerintah, dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada alokasi dana yang cukup, tetapi juga memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana (Berliani et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan

serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dapat merata dan terus berkembang. Dengan demikian, diharapkan kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang lebih baik dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, menuju tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain literatur review (Syamsuddin et al., 2023), yang bertujuan untuk mengkaji kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan penelitian dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan organisasi internasional. Subjek penelitian adalah berbagai kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang diterapkan di berbagai negara, dengan fokus pada Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur yang relevan di berbagai database akademik dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pustaka yang diseleksi berdasarkan kualitas dan relevansinya terhadap topik yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis konten, di mana penulis menilai dan menyarikan temuan-temuan utama dari literatur yang ada untuk menarik kesimpulan mengenai praktik manajemen pembiayaan yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Hasil Penelitian

Hasil penelitian (Iqbal et al., 2024) menunjukkan bahwa kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu temuan utama yang muncul dari kajian literatur adalah pentingnya alokasi dana yang merata di seluruh tingkat pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dana yang disalurkan pemerintah, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), terbukti membantu sekolah-sekolah di daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan. Meski demikian, ketimpangan distribusi dana antara daerah kaya dan miskin masih menjadi masalah signifikan, yang berpengaruh pada akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan yang tidak efisien dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan (Suryadi et al., 2024). Meskipun beberapa kebijakan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sering kali menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakjelasan dalam penggunaannya. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam penggunaan dana yang akhirnya memperburuk kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat, agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Selanjutnya, penelitian (Utami et al., 2024) menemukan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan yang terintegrasi dengan peningkatan kesejahteraan guru turut

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan. Dana yang diperuntukkan bagi tunjangan guru dan pelatihan profesional dapat memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Ketika guru merasa dihargai dan mendapatkan insentif yang cukup, mereka cenderung lebih termotivasi dalam mengajar, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada pencapaian akademik siswa. Oleh karena itu, kebijakan yang melibatkan alokasi dana untuk kesejahteraan guru dan pelatihan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan turut mempengaruhi efektivitas kebijakan pembiayaan pendidikan (Fadhila & Riani, 2024). Partisipasi yang aktif dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pendidikan memberikan dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka lebih merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang bagi orang tua dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pendidikan, termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan.

Hasil penelitian juga menyoroti bahwa dalam beberapa daerah, pengelolaan pembiayaan pendidikan terkendala oleh kurangnya kapasitas sumber daya manusia, baik di tingkat pemerintah daerah maupun sekolah (Purwaningsih & Asriati, 2024). Kurangnya keterampilan dalam manajemen keuangan dan pengelolaan dana pendidikan menyebabkan ketidakmampuan dalam memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan, diperlukan

pelatihan dan pembekalan bagi para pengelola pendidikan agar mereka dapat mengelola dana secara efisien dan akuntabel.

Penelitian (Krisno, 2024) juga menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan fleksibilitas pada pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pembiayaan dengan kondisi lokal memiliki dampak yang lebih positif. Di beberapa daerah, kebijakan yang terlalu terpusat dan tidak mempertimbangkan kondisi setempat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan disesuaikan dengan karakteristik daerah akan meningkatkan keberhasilan kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan.

Selain itu, salah satu temuan yang cukup signifikan adalah pentingnya keberlanjutan dalam kebijakan pembiayaan pendidikan (Ananta et al., 2024). Kebijakan yang hanya fokus pada pemberian dana dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya sering kali gagal untuk menciptakan dampak jangka panjang yang diinginkan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang melibatkan perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. Untuk itu, kebijakan pendidikan harus dilandasi dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa dana pendidikan dikelola dengan baik dan efektif.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti perubahan sosial dan ekonomi juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan. Temuan dari penelitian (Zuhro et al., 2024) menunjukkan bahwa dalam menghadapi perubahan global, seperti kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk pendidikan yang berbasis digital, kebijakan pembiayaan pendidikan juga harus menyesuaikan diri. Oleh karena itu, alokasi dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi perlu menjadi

bagian integral dari kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan.

Penelitian (Groenewald et al., 2024) juga menunjukkan bahwa ada tantangan dalam hal kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan di kalangan pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan. Meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengelola dana pendidikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya program-program pelatihan untuk para pengambil kebijakan dan pengelola pendidikan agar mereka lebih memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang merata, efisien, dan transparan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pengawasan yang ketat, serta pemberdayaan guru dan pengelola pendidikan akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Keberhasilan kebijakan pembiayaan pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan implementasinya di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan yang signifikan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal serta dukungan yang kuat dari semua pihak terkait.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu temuan utama dalam literatur yang dikaji oleh (Iqbal et al., 2024) adalah bahwa keberhasilan kebijakan pembiayaan pendidikan sangat tergantung pada bagaimana dana dialokasikan, digunakan, dan dikelola. Alokasi dana yang efisien dan transparan dapat menciptakan sistem



pendidikan yang lebih berkualitas. Misalnya, di Indonesia, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah terbukti memberikan dampak positif dalam menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah-sekolah, serta memperbaiki kesejahteraan guru, yang tentunya berkontribusi pada kualitas pendidikan.

Namun, meskipun dana telah dialokasikan, hasil kajian (Irianto & Lilia, 2024) juga menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam distribusi dana pendidikan antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin. Ketimpangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan dalam fasilitas pendidikan yang tersedia di berbagai daerah, yang berpengaruh pada kualitas pendidikan. Di daerah-daerah dengan anggaran yang terbatas, sekolah-sekolah sering kali mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dana yang tidak merata dapat menjadi hambatan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Selain masalah distribusi dana, temuan penelitian (Krisno, 2024) juga menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana pendidikan. Tanpa pengawasan yang efektif, dana yang disalurkan dapat disalahgunakan atau tidak digunakan dengan cara yang tepat. Beberapa studi menunjukkan bahwa adanya kasus penyalahgunaan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sistem pelaporan yang transparan, agar dana yang diterima oleh sekolah benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk kepentingan lain.

Salah satu aspek yang juga ditemukan penting dalam kebijakan manajemen

<https://journal.journeydigitaledutama.com>

pembiayaan pendidikan adalah pemberdayaan guru dan tenaga pendidik (Sari & Yasin, 2024). Kesejahteraan guru, baik dalam bentuk tunjangan maupun pengembangan profesional, memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengajaran. Penelitian ini mencatat bahwa di banyak daerah, kurangnya insentif dan pelatihan bagi guru menyebabkan kualitas pengajaran menurun. Dalam hal ini, dana pendidikan yang dikelola dengan baik harus memperhatikan aspek kesejahteraan guru, karena guru yang sejahtera akan lebih termotivasi dan siap memberikan pengajaran yang berkualitas kepada siswa (Far, 2021).

Kebijakan manajemen pembiayaan yang sukses juga bergantung pada keselarasan antara kebijakan pusat dan implementasinya di tingkat daerah (Liani & Takari, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu terpusat sering kali menemui kendala saat diterapkan di daerah. Misalnya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih fleksibel, di mana pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan, asalkan tetap dalam koridor kebijakan nasional yang sudah ditetapkan.

Pendidikan yang berkualitas juga tidak hanya bergantung pada penyediaan dana yang memadai, tetapi juga pada sistem pengelolaan yang profesional dan efisien (Azzahra et al., 2024). Penelitian ini menemukan bahwa di beberapa daerah, ketidakterampilan dalam mengelola dana pendidikan menjadi kendala besar. Pengelola pendidikan di tingkat lokal sering kali tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang cukup dalam hal manajemen keuangan, sehingga penggunaan dana tidak dapat dimaksimalkan. Untuk itu, penting adanya pelatihan bagi pengelola pendidikan agar

mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola dana dengan efisien.

Selain itu, temuan lain yang diperoleh dari penelitian (Shava et al., 2023) adalah pentingnya partisipasi masyarakat dan orang tua siswa dalam pengelolaan pendidikan. Masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan, terbukti memberikan dampak positif. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada sumbangan dana, tetapi juga pada keterlibatan dalam proses pengawasan dan evaluasi, yang membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika orang tua dan masyarakat merasa memiliki, mereka cenderung lebih peduli terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka dan lebih berkomitmen untuk memastikan penggunaan dana pendidikan yang tepat.

Tinjauan pustaka juga menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih inklusif dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan (Purwaningsih & Asriati, 2024). Kebijakan yang mempertimbangkan keberagaman kondisi daerah, seperti daerah terpencil atau daerah miskin, memungkinkan pendanaan yang lebih tepat sasaran. Sebagai contoh, beberapa negara telah mengimplementasikan kebijakan yang memberikan dana tambahan bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal. Kebijakan semacam ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah kaya dan miskin, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan yang lebih inklusif sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan yang ada antar daerah (Sari & Yasin, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat sudah mencanangkan berbagai kebijakan yang baik, seperti dana BOS dan dana bantuan pendidikan lainnya, pelaksanaannya di daerah sering kali tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman

mengenai kebijakan, rendahnya kapasitas pengelola di daerah, dan ketimpangan ekonomi antar daerah yang cukup besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem distribusi dana pendidikan dan memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat daerah.

Kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik juga harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang (Shava et al., 2023). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa kebijakan pembiayaan pendidikan sudah cukup efektif dalam jangka pendek, tetapi tidak sedikit yang gagal dalam mempertahankan dampak positifnya dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan dana untuk pendidikan saat ini, tetapi juga pada perencanaan jangka panjang yang memastikan bahwa pendidikan dapat terus berkembang dan bertahan.

Dalam praktiknya, kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan juga harus mampu menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan pendidikan harus mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran (Suryadi et al., 2024). Untuk itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pembiayaan yang juga mencakup penyediaan dana untuk pengembangan infrastruktur teknologi, seperti fasilitas internet di sekolah-sekolah yang belum memiliki akses yang memadai. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi untuk proses belajar mengajar.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui manajemen pembiayaan, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi, politik, dan budaya dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan.



<https://journal.journeydigitaledutama.com>

Sebagai contoh, di daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kebijakan pendidikan yang tidak memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat tidak akan efektif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal ini agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan bahwa kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif harus mencakup aspek distribusi dana yang merata, pengawasan yang ketat, pemberdayaan guru, dan partisipasi masyarakat. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana pendidikan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan pendidikan di seluruh wilayah, sehingga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah perlunya kebijakan pembiayaan pendidikan yang lebih terfokus pada daerah-daerah yang kurang berkembang dan membutuhkan perhatian lebih. Penguatan kapasitas pengelola pendidikan di tingkat daerah, pelatihan untuk pengelola dana pendidikan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan optimal. Hanya dengan langkah-langkah ini, pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Alokasi dana yang merata, pengelolaan yang efisien dan transparan, serta pemberdayaan guru dan pengelola pendidikan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan distribusi dana, kurangnya kapasitas manajerial, serta partisipasi masyarakat yang terbatas, menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan pendidikan perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif, terdesentralisasi, dan berkelanjutan diperlukan agar kebijakan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar kebijakan manajemen pembiayaan pendidikan lebih memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam pendistribusian dana, dengan melibatkan masyarakat dan orang tua siswa dalam pengawasan penggunaan dana. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengelola pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pelatihan dan penguatan manajerial dalam pengelolaan dana. Selain itu, penting untuk memastikan kebijakan pembiayaan pendidikan bersifat berkelanjutan dengan memprioritaskan perencanaan jangka panjang serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan di masa depan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Akbar, W. S., & Syamsir, S. (2024). Reformasi Sistem Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (Procurement) Kabupaten Dharmasraya Sumatera

- Barat. *Jurnal Publik*, 18(02), 83–95. <https://doi.org/10.52434/jp.v18i02.343>
- Ananta, A., Brantasari, M., Anggraeni, A., & Warman. (2024). Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga di Kalimantan Timur. *Jurnal Pendas Mahakam*, 9(8), 128–135.
- Azzahra, S., Syarif, U., & Jakarta, H. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Siswa. *Al Faizi: Jurnal Hukum, Politik, & Bisnis*, 152(2), 152–165. <https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/faizi>.
- Berliani, D., Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *Jurnal DIRASAH*, 7(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>.
- Fadhila, N., & Riani, L. P. (2024). Menelisk Problematika Pembiayaan Pendidikan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Menelisk Problematika Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK>.
- Far, G. (2021). Efektifitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting Dalam Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 17(1), 1–7.
- Groenewald, E. S., Kit, O., Kilag, T., Groenewald, E. S., Rabillas, A. R., Uy, F. T., Kilag, T., Bugtai, G. S., & Batilaran, J. A. (2024). Enhancing Financial Management Practices in Public Schools: A Systematic Literature Review in Southeast Asia. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence*, 1(2). <https://www.researchgate.net/publication/378508162>
- Iqbal, M., Junaidi, Harahap, N. I. Y., Syafiti, A., & Devi, I. (2024). Manajemen Kebijakan Pembiayaan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. *JM-TBI: Jurnal Manajemen Dan Tarbiyatul Islam*, 5, 1–20.
- Irianto, B. R., & Lilia, P. R. (2024). Permasalahan Pembiayaan Pendidikan Pada Otonomi Daerah Di Indonesia. *Seminar Nasional & Call For Paper Pendidikan Ekonomi UNIPMA*, 85–97. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK>
- Krisno, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(6).
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Syntax Admiration*, 5(11), 2722–2782.
- Mardonov, S., Thostemirova, S., Ahmadjonov, B., & Koshanova, N. (2020). Structure and Mechanisms of Action of The Educational Cluster. *International Journal of Psychological Rehabilitation*, 24, 1475–17192.
- Purwaningsih, D., & Asriati, N. (2024). Pengelolaan Keuangan Pendidikan dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 4(4), 1723–1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>.
- Sari, F. A., & Yasin, M. (2024). Pendidikan dan Stratifikasi Sosial: Kebijakan dan Praktek Pendidikan dalam Mengurangi Stratifikasi Sosial di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial*, 2(3).
- Shava, G. N., Mkwelie, N., Ndlovu, M. J., & Zulu, E. (2023). Higher Education Institutions' Sustainable Development towards



- Agenda 2030: A Global Goals in Policy and Curriculum. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(IV), 1320–1336. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2023.7510>.
- Sitorus, E. R. B., Widiayati, Nurdiansari, Nurlawati, & Haryaka, U. (2024). Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tingkat SMP di Indonesia Tantangan dan Strategi Penanganan. *Jurnal Pendas Mahakam*, 9(4), 73–84.
- Suryadi, F., Siahaan, A. D., Sabri, A., & Lubis, Y. (2024). Peran Manajemen Pendidikan dalam Mewujudkan Sekolah Berkualitas. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(4), 92–107. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i4.2617>.
- Syamsuddin, N., Simbolon, G. A. H., Surni, Gani, R. A., Guntur, M., Maulidah, Taufik, M., Presty, M. R., & Pitri, A. D. (2023). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (I. Haidar, S. Nurjanah, S. B. Tondok, & Sudirman, Eds.; 1st ed.). Yayasan Hamjah Diha.
- Utami, R. R., Ahmad, A., Transit, F. A., Az-Zahra, N., Marhamah, S., Sarah, A. I., & Silvia, P. T. (2024). Peran Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8.
- Zuhro, S., Taufik, I., & Imelda, D. R. (2024). The Use of Digital Platforms in Financing Management in Primary Schools. *International Journal of Economic Integration and Regional Competitiveness*, 1(6), 1–12. <https://economic.silkroad-science.com/index.php/IJEIRC>